

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Semua pihak termasuk pemerintah, berupaya mengatasi hal ini melalui reformasi disegala bidang. Salah satu upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan otoriter yang dikenal dengan *Good Governance*. Salah satu kunci terwujudnya *good governance* yaitu memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah secara otomatis terpenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan tentang hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan kelompok masyarakat sipil Septiyani et al., (2020).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja Rahayu & Yudi., (2021). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun berdasarkan beberapa tahapan yaitu penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reuiu dan evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah bersinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat diketahui dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah.

Output utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP digunakan sebagai alat pelaporan untuk menggambarkan efektivitas instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pembuatan LAKIP didasarkan pada siklus anggaran satu tahun, dan selama pelaksanaan LAKIP, instansi pemerintah harus dapat mengkuantifikasi kinerjanya, baik dalam angka maupun persentase. LAKIP dapat digunakan sebagai dokumen penilaian bagi instansi pemerintah selama satu tahun anggaran.

Suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan misi organisasi. Guna mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Instansi Pemerintah merangkul capaian kinerja yang telah ditargetkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal tersebut sebagai perwujudan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama tahun 2022 dalam melakukan misi dan tujuan organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Evaluasi AKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Perencanaan Kinerja	30	22,20
II	Pengukuran Kinerja	30	22,50
III	Pelaporan Kinerja	15	12,30

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
IV	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
NILAI HASIL EVALUASI		100	77,00

Sumber: AKIP Kanwil Kemenkumham Sumsel 2022

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada tabel 1.1 di atas, penilaian untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan diperoleh nilai 77 dengan predikat BB (Sangat Baik) yang diinterpretasikan telah terdapat gambaran bahwa akuntabilitas sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi pengguna anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Disebutkan dalam LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bahwa masi ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kinerja yaitu adanya kebijakan *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran) tahun 2022. Dari adanya kebijakan tersebut menyebabkan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tidak mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini, kendala yang dialami oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran memengaruhi efektivitas dan efisiensi akuntabilitas kinerja mereka. Ketidakmampuan untuk mencapai target yang maksimal juga menunjukkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Salah satu tantangan untuk memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anisa & Haryanto., (2022) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Aprilianti et al., (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian dari Febrianti & Yuhertiana., (2021) dan Rahayu & Yudi., (2021) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tantangan selanjutnya adalah pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah bisa melaksanakan ketentuan yang kian baik, mengatur aktivitas dengan lebih efektif, bisa memperkirakan biaya dan keuntungan, keberhasilan dan memutuskan alternatif terbaik dalam setiap kejadian dan masalah sehingga bisa meningkatkan kinerja Septiyani dkk., (2020). Hasil evaluasi AKIP Pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sumatera selatan disampaikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan yaitu menyusun mekanisme dan prosedur pengendalian yang memadai dalam penyusunan laporan kinerja, agar laporan kinerja menyajikan analisa/informasi yang memadai serta data yang andal dan berkualitas atas target dan capaian kinerja yang disajikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anisa & Haryanto., (2022), Septiyani dkk., (2020), dan Hayani & Julita., (2021) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut Hidayat dkk., (2021) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tantangan terakhir yang dapat membangun terbentuknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan berguna untuk memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang baik yang dapat menyajikan informasi secara terbuka tentang keputusan yang dibuat oleh pemerintah selama periode tertentu dan memantau serta mengontrol kinerja pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan perlu melakukan perbaikan dalam menyusun laporan kinerja yang memuat analisa kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja. Melaksanakan rekomendasi perbaikan peningkatan kualitas kinerja yang merujuk pada tugas dan fungsi masing-masing divisi dalam mengkoordinasikan sistem pelaporan kinerja.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Anisa & Haryanto., (2022), Septiyani dkk., (2020), dan Aprilianti dkk., (2020) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, bahwa hasil dari penelitian-penelitian tersebut menghasilkan hasil yang berbeda walaupun menggunakan variabel yang sama, sehingga penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan variabel yang sama ditempat yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan?
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan?

4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar lebih terfokus pada tujuan dari penulisan skripsi. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji :

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi lembaga, sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.